

#### 94. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (datasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seseorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri dari :

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya penginapan; dan uang representase perjalanan dinas.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk wilayah Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Moncongloe sedangkan uang transportasi lokal diberikan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Wilayah Kecamatan Simbang, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Turikale, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Tanralili. Untuk tujuan perjalanan dinas pada wilayah Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa, Sopir Kepala Perangkat Daerah dan Patwal hanya diberikan uang makan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.

TABEL 1  
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROPINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	OH	Rp360.000,00	-	Rp110.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
3.	Riau	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
5.	Jambi	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
8.	Lampung	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp410.000,00	-	Rp120.000,00
11.	Banten	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
12.	Jawa Barat	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	Rp530.000,00	-	Rp160.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp420.000,00	-	Rp130.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp410.000,00	-	Rp120.000,00
17.	Bali	OH	Rp480.000,00	-	Rp140.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000,00	-	Rp130.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000,00	-	Rp110.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00

NO.	PROPINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000,00	-	Rp120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
31.	Maluku	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
33.	Papua	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp480.000,00	-	Rp140.000,00
35.	Papua Barat Daya	OH	Rp480.000,00	-	Rp140.000,00
36.	Papua Tengah	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00
37.	Papua Selatan	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00
38.	Papua Pengunungan	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00

## 2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 2.

TABEL 2  
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	Pejabat Eselon I	OH	Rp200.000,00	Rp75.000,00
3.	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.

TABEL 3  
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Pihak Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	Riau	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.138.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	Jambi	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	Lampung	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	Banten	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00

NO.	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Pihak Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Jawa Barat	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	Bali	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp3.088.000,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	Maluku	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	Papua	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	Papua Barat Daya	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	Papua Tengah	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	Papua Selatan	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	Papua Pegunungan	OH	Rp5.711.00,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
- b. Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*

#### 95. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

##### 1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

##### a. Paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

##### b. Paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

##### c. Paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6.

TABEL 4.

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	OP	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp1.116.000,00
2.	Sumatera Utara	OP	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.126.000,00
3.	Riau	OP	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp901.000,00
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00
5.	Jambi	OP	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.060.000,00
6.	Sumatera Barat	OP	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00
8.	Lampung	OP	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00
9.	Bengkulu	OP	Rp383.000,00	Rp538000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00
10.	Bangka Belitung	OP	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00
11.	Banten	OP	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00
12.	Jawa Barat	OP	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OP	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00
14.	Jawa Tengah	OP	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OP	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp1.065.000,00
16.	Jawa Timur	OP	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00
17.	Bali	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp1.644.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.200,00	Rp1.134.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp925.000,00
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp1.115.700,00
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00
26.	Gorontalo	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp952.000,00
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.092.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00
31.	Maluku	OP	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp1.101.000,00
32.	Maluku Utara	OP	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.268.000,00
33.	Papua	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
34.	Papua Barat	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.	Papua Barat Daya	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
36.	Papua Tengah	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
37.	Papua Selatan	OP	Rp709.000,00	Rp1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp1.838.000,00
38.	Papua Pegunungan	OP	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp1.809.000,00

TABEL 5

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT  
ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	OP	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp988.000,00
2.	Sumatera Utara	OP	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp922.000,00
3.	Riau	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp711.000,00
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp962.000,00
5.	Jambi	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.298.000,00	Rp950.000,00
6.	Sumatera Barat	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp893.000,00
8.	Lampung	OP	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp950.000,00	Rp933.000,00
9.	Bengkulu	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp811.000,00
10.	Bangka Belitung	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00
11.	Banten	OP	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
12.	Jawa Barat	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
14.	Jawa Tengah	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp777.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OP	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp839.000,00
16.	Jawa Timur	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021.000,00
17.	Bali	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.201.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp463.000,00	Rp602.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.065.000,00
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp969.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp815.000,00
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp802.000,00
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00
26.	Gorontalo	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp842.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp854.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp982.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
31.	Maluku	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp991.000,00
32.	Maluku Utara	OP	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
33.	Papua	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
34.	Papua Barat	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
35.	Papua Barat Daya	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
36.	Papua Tengah	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
37.	Papua Selatan	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00
38.	Papua Pegunungan	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00

TABEL 6

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR PEJABAT  
ESELON III KE BAWAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	OP	Rp310.000,00	Rp397.000,00	Rp948.000,00
2.	Sumatera Utara	OP	Rp279.000,00	Rp427.000,00	Rp764.000,00
3.	Riau	OP	Rp219.000,00	Rp397.000,00	Rp888.000,00
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp241.000,00	Rp297.000,00	Rp807.000,00
5.	Jambi	OP	Rp288.000,00	Rp367.000,00	Rp1.110.000,00
6.	Sumatera Barat	OP	Rp180.000,00	Rp248.000,00	Rp696.000,00
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp290.000,00	Rp455.000,00	Rp745.000,00
8.	Lampung	OP	Rp220.000,00	Rp290.000,00	Rp933.000,00
9.	Bengkulu	OP	Rp268.000,00	Rp416.000,00	Rp1.054.000,00
10.	Bangka Belitung	OP	Rp343.000,00	Rp411.000,00	Rp965.000,00
11.	Banten	OP	Rp340.000,00	Rp425.000,00	Rp1.051.000,00
12.	Jawa Barat	OP	Rp414.000,00	Rp498.000,00	Rp931.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OP	Rp359.000,00	Rp455.000,00	Rp1.197.000,00
14.	Jawa Tengah	OP	Rp255.000,00	Rp319.000,00	Rp770.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OP	Rp262.000,00	Rp351.000,00	Rp750.000,00
16.	Jawa Timur	OP	Rp338.000,00	Rp408.000,00	Rp1.381.000,00
17.	Bali	OP	Rp362.000,00	Rp441.000,00	Rp1.419.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp397.000,00	Rp420.000,00	Rp820.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp339.000,00	Rp448.000,00	Rp1.032.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp277.000,00	Rp387.000,00	Rp774.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp288.000,00	Rp365.000,00	Rp1.272.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp250.000,00	Rp366.000,00	Rp809.000,00
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp241.000,00	Rp366.000,00	Rp900.000,00
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp260.000,00	Rp331.000,00	Rp874.000,00
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp269.000,00	Rp357.000,00	Rp922.000,00
26.	Gorontalo	OP	Rp225.000,00	Rp289.000,00	Rp1.299.000,00
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp269.000,00	Rp404.000,00	Rp1.006.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp280.000,00	Rp397.000,00	Rp1.307.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp303.000,00	Rp422.000,00	Rp1.095.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp309.000,00	Rp369.000,00	Rp869.000,00
31.	Maluku	OP	Rp265.000,00	Rp346.000,00	Rp933.000,00
32.	Maluku Utara	OP	Rp254.000,00	Rp446.000,00	Rp803.000,00
33.	Papua	OP	Rp321.000,00	Rp478.000,00	Rp1.182.000,00
34.	Papua Barat	OP	Rp310.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00
35.	Papua Barat Daya	OP	Rp310.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00
36.	Papua Tengah	OP	Rp321.000,00	Rp478.000,00	Rp1.182.000,00
37.	Papua Selatan	OP	Rp472.000,00	Rp703.000,00	Rp1.738.000,00
38.	Papua Pegunungan	OP	Rp472.000,00	Rp703.000,00	Rp1.738.000,00

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 7

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Aceh	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	Riau	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	Jambi	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	Lampung	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	Banten	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
12.	Jawa Barat	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	Bali	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	Maluku	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	Papua	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
35.	Papua Barat Daya	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36.	Papua Tengah	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37.	Papua Selatan	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38.	Papua Pegunungan	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

96. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 8, Tabel 9, Tabel 10, dan Tabel 11.

TABEL 8  
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp878.913.000,00
II	PEJABAT ESELON II :		
	Sulawesi Selatan	Unit	Rp586.696.000,00

**TABEL 9**  
**KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4**  
**(EMPAT)**

No.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp284.029.000,00	Rp419.033.000,00	Rp554.368.000,00

**TABEL 10**  
**KENDARAAN OPERASIONAL BUS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000,00
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000,00

**TABEL 11**  
**KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)**

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000,00	Rp39.121.000,00

**TABEL 12**  
**KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp966.804.000,00
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000,00
3	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000,00
4	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000,00

Keterangan :

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran